

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak, baik itu SDA yang dapat diperbaharui maupun SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti Minyak dan Gas Bumi (MIGAS). Tahap terbentuknya migas menurut teori organik diawali dengan matinya organisme tumbuhan dan hewan yang hidup pada zaman purba. Kemudian fosil hewan dan tumbuhan tadi akan tertimbun pasir dan lumpur selama jutaan tahun sehingga membentuk lapisan zat organik. Akibat adanya tekanan serta temperatur yang cukup tinggi akhirnya lapisan tersebut akan menjadi batuan endapan (*sedimentary rock*) yang mengandung migas.¹

Migas merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam setiap kegiatan-kegiatan manusia. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain untuk Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu. Sehingga pada Negara berkembang seperti Indonesia sangat melindungi dan mengawasi

¹<http://www.prosesindustri.com/2016/02/tahap-terbentuknya-migas-menurut-teori-organik.html>. Di akses 21 Mei 2017.

penyaluran dan peredaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut.

Salah satu perusahaan minyak terbesar di Indonesia adalah PT. PERTAMINA (PERSERO) yang mana perusahaan tersebut telah memproduksi berbagai macam jenis minyak bumi dan gas, dan telah di produksi ke mancanegara. PT. PERTAMINA (PERSERO) juga mempunyai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau bisa disingkat dengan SPBU yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat kini telah menciptakan ide kreatif untuk menghasilkan keuntungan yang banyak demi kekayaan pribadi yaitu dengan menciptakan Pertamina.² Pertamina adalah label yang digunakan oleh penjual Bahan Bakar Minyak eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol bekas minuman bersoda, melainkan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran, dan yang lebih hebatnya lagi penjual memakai alat Pertamina digital yang sangat menyerupai bentuk mesin pompa yang dimiliki SPBU milik PT. PERTAMINA (PERSERO) pada umumnya. Pertamina telah ada sekitar tahun 2012, dan mulai marak sekitar tahun 2014. Kios ini menjadi alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar, sementara lokasi SPBU masih jauh. Selain menjual bensin jenis Premium, sebagian kios Pertamina juga mulai menjual jenis Pertamina dan Peralite.

Nama Pertamina terkesan memiliki nama yang mirip dengan PT.

PERTAMINA (PERSERO), namun Pertamina bukan bagian dari PT.

² Istilah Pertamina merupakan istilah yang lazim berkembang di masyarakat terhadap penjual minyak eceran yang menggunakan alat pompa khusus seperti yang digunakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

PERTAMINA (PERSERO) dan dimasukkan ke dalam bisnis yang ilegal. Pertamina secara tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi negara, PT. PERTAMINA (PERSERO), dan masyarakat. Subsidi BBM yang telah diberikan oleh Negara kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Namun dengan adanya fenomena penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina, Negara telah dirugikan karena telah mengeluarkan anggaran dalam APBN untuk mensubsidi BBM yang ternyata banyak disalahgunakan oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Di sisi lain, PT. PERTAMINA (PERSERO) juga dirugikan secara tidak langsung oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina karena persamaan nama yang hampir sama dan lambang yang sama, tentunya itu dapat menimbulkan pendapat negatif dalam masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, Pertamina telah merugikan masyarakat karena menjual BBM dengan harga yang lebih mahal dibandingkan SPBU. Padahal, BBM yang dijual oleh Pertamina adalah BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah.

Keberadaan Pertamina dari aspek keperluan praktis ada kelebihan maupun kekurangannya. Kelebihan dari keberadaan Pertamina yaitu konsumen dengan mudah bisa mendapatkan Bahan Bakar Minyak dengan lokasi yang mudah dijangkau, Kekurangan dari keberadaan Pertamina yaitu konsumen harus membayar lebih mahal membeli Bahan Bakar Minyak dibandingkan dengan membeli langsung ke Stasiun Penjualan Bahan bakar Umum. Realita keberadaan Pertamina sebagai penjual Bahan Bakar Minyak

secara eceran tidak bisa dihindarkan, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan, sehubungan dengan hal ini akan dicermati keberadaan pertamini di Kota Pariaman. Kota ini memiliki stasiun Pertamina yang lumayan banyak namun, dari aspek pelaksanaan belum patut untuk ditelusuri apakah ada izin usahanya yang di keluarkan dari Pemerintah Daerah. Sedikitnya jumlah SPBU yang ada di Kota tersebut dan bebasnya warga di Kota tersebut membeli minyak kendaraan bermotor dengan menggunakan jerigen yang berukuran besar menjadi penyebab menjamurnya para sub penyalur BBM di Kota Pariaman.

PT. PERTAMINA (PERSERO) telah menyatakan larangan menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar kepada pengecer. Hal tersebut diketahui melalui surat yang dikeluarkan PT. PERTAMINA yang disampaikan oleh Ardyan Adhitia, Marketing Branch Manager Pertamina Sumatera Barat-Riau. Lewat surat resminya yang diterbitkan 17 November 2014 menegaskan bahwa SPBU hanya diizinkan menjual premium dan solar kepada konsumen akhir. Ditinjau dari Hukum Administrasi, surat tersebut tergolong kedalam surat edaran yang ditujukan kepada pengusaha Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU). Selanjutnya di dalam praktek di temukan pengusaha tersebut melanggar surat edaran yang di keluarkan PT. PERTAMINA, dan di beberapa SPBU yang ada di wilayah Kota Pariaman telah terlampir pamflet yang berisikan tentang larangan untuk menjual BBM kepada konsumen menggunakan jerigen. Sedangkan menjual kepada pengecer atau pembeli yang membawa jerigen maupun drum dilarang keras. Sedangkan untuk BBM jenis lainnya

seperti pertalite, pertamax, pertamax plus, dextrite, dan dex sama sekali tidak disinggung di dalam surat yang artinya masih diperbolehkan untuk dijual secara eceran.³

Melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Untuk menjadi sub penyalur Bahan Bakar Minyak tersebut perlu adanya Izin usaha untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi atau kegiatan usaha Gas Bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, izin usaha niaga.

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi paling sedikit memuat nama penyelenggaraan, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat-syarat teknis. Berikut syarat untuk menjadi sub penyalur BBM berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan

³ <http://kabar24.bisnis.com/read/20141117/78/273530/spbu-di-sumbar-riau-perketat-pembelian-dengan-jerigen>. Di akses pada 10 Januari 2018.

Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat

Penyalur :

1. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
2. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur
7. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 km dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses memperoleh izin usaha untuk menjadi sub penyalur Bahan Bakar Minyak tersebut ?
2. Bagaimana pengawasan terhadap keberadaan sub penyalur Bahan Bakar Minyak di Kota Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses memperoleh izin usaha untuk menjadi sub penyalur Bahan Bakar Minyak di Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap keberadaan sub penyalur Bahan Bakar Minyak di Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap peneliti dan pihak-pihak lainnya yang terkait berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk

mencapai gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁵

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6.

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm 4.

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁶ Untuk melaksanakan metode penelitian tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum ini memakai jenis metode penelitian hukum empiris, yang mana mempunyai definisi sebagai penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.⁸

3. Sumber dan Jenis Data

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 36.

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 20

⁸*Ibid.*, hlm. 25.

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui:

1. Penelitian Kepustakaan

Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁹ Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada:

a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. Buku-Buku dan Literature Yang Penulis Miliki

Dari hasil penelitian kepustakaan ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁰

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan BPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 Tentang
Penyaluran Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada
Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

⁹*Ibid.*, hlm. 12.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 176.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
2. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

2. Penelitian Lapangan

Data penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).¹² Penelitian lapangan dilakukan di Kota Pariaman.

b. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.¹³ Data ini diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu Kepala Dinas Perizinan Kota Pariaman, BPH Migas Kota Pariaman, dan pengusaha sub penyalur BBM.

2. Data Sekunder

¹¹ *Ibid.*, hlm. 176.

¹² *Ibid.*, hlm. 176-177.

¹³ Amiruddin, *Op. Cit.*, hlm. 30.

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum tersebut harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, karena hal itu sangat menentukan hasil suatu penelitian.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁶

Pihak yang akan di wawancarai dalam hal ini adalah:

1. Petugas Kantor Dinas Perizinan yaitu Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Kota Pariaman.
2. Petugas Kantor PT. Pertamina yaitu pengawas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kampung Pondok Kota Pariaman.
3. Pengusaha Sub Penyalur BBM.

c. Populasi dan Sampel

¹⁴*Ibid.*, hlm. 30.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 68.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 82.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probabilitas*, yaitu setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Bentuk sampel *non-probabilitas* ini adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁷

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data lapangan, maka pengolahan dan analisis data akan dilakukan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Adapun pengolahan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *editing*

Adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara

¹⁷*Ibid.*, hlm. 103-106.

mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

